

Marxisme

ANALISIS BUDAYA

ARIEL HERYANTO

Profesor Emeritus dari Universitas Monash, Australia



Sulit dicerna akal sehat mengapa sebuah paham dianggap mengancam sebuah negara. Apalagi jika itu paham seperti Marxisme. Terlebih aneh jika dalih yang dipakai untuk melarangnya: paham itu dianggap bertentangan dengan Pancasila. Aneh tapi nyata itu bernama Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP.

Marxisme sudah hadir di tanah jajahan Hindia Belanda sebelum wilayah ini disebut Indonesia. Bersama isme-isme lain, Marxisme mendorong perjuangan kemerdekaan RI sebelum lahirnya Pancasila. Berkat ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara (1945), bangsa majemuk ini bisa bersatu, merdeka, dan saling bertoleransi dalam perbedaan ideologi, paham, dan isme.

Ide bahwa Marxisme bertentangan dengan Pancasila dikarang Orde Baru pada pertengahan 1960-an. Dua dekade kemudian, islamisme dianggap ancaman bagi Pancasila. Pantas, dalam KUHP yang baru, selain Marxisme, disebut ada paham-paham lain yang dianggap menentang Pancasila. Jadi, semakin sulit membedakan pemerintahan masa kini dari rezim Orde Baru.

Yang diancam KUHP bukan hanya penyebar paham yang menentang Pancasila, melainkan juga penyebar kabar bohong. Ironis jika KUHP ini disusun berdasarkan kabar bohong Orde Baru serta tidak sesuai dengan Pancasila yang semula memperkuat keutuhan bangsa dan toleransi.

Pancasila dibajak Orde Baru sebagai senjata politik untuk menjagal lawan politik dan menjegal kekuasaan Presiden Soekarno. Sejak itu fungsi Pancasila bertolak belakang dengan Pancasila sebagai dasar negara (1945). Sejak itu istilah "anti-Pancasila" terhambur berpuluh tahun dan korbannya bertumbangan di mana-mana.

Soekarno bukan hanya proklamator kemerdekaan dan presiden pertama RI. Ia adalah juga penggemar berat Marxisme. Hal itu lazim bagi kaum terpelajar di masa hidup Soekarno, termasuk mereka yang kemudian menjadi pejabat tinggi negara di awal kemerdekaan RI. Pengaruh

(Bersambung ke hlm 15 kol 6-7)

SABTU, 7 JANUARI 2023

KOMPAS

diunduh dari arielheryanto.com

Jika hukum disusun secara sewenang-wenang dan sulit dilawan, ia akan dilahap masyarakat tanpa dikunyah. Lalu dimuntahkan kembali ke realitas sehari-hari secara kreatif, sesuai selera masing-masing. Hasilnya penuh kejutan dan kocak, sulit dijelaskan dengan Marxisme, apalagi dengan ilmu hukum. Berikut ini beberapa contohnya.

Di masa Orde Baru, berkat beasiswa studi di luar negeri, saya bisa membeli buku-buku Marxisme. Selesai studi, buku-buku itu saya kirimkan ke Tanah Air lewat pos. Semua lolos. Yang disita petugas imigrasi malah novel berjudul *Atheis* karya Achdiat Kartamihardja. Penerbitnya Pemerintah RI, majikan si petugas. Buku itu sudah dicetak sebanyak 13 kali, dijual di toko-toko dan dibahas di kelas-kelas SMA. Isinya antikomunis.

Pendahulu Badan Intelijen Negara (BIN) disebut Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin). Sewaktu dipimpin Letnan Jenderal Sutopo Yuwono, ia berkisah rahasia dapurnya: "Sebagai intel, kita mengarang isu, yang kemudian kita lemparkan entah di pers cetak, radio, atau televisi. Kita bikin seolah-olah cerita ini *beneran*. Biasanya, setelah dilemparkan, orang akan membahas dan cenderung *nam-bah-nambah*. Akhirnya, isu tadi kan kembali menjadi laporan. Nah, lucunya, dari laporan yang kembali itu, kita sendiri percaya bahwa itu *beneran*, ha-ha-ha. Bahkan, ketakutan sendiri dan berpikir, jangan-jangan isu tadi memang *bener...*"

Awal 1990-an, anak saya termasuk generasi yang diwajibkan menonton film *Pengkhianatan G30S/PKI*. Suatu hari, ia pulang dari sekolah dan berkisah dengan menggebu tentang "asyiknya bermain PKI-PKI-an" bersama sejumlah teman sekolah pada jam istirahat. Mainan apa itu? Dia menjelaskan: "Anak-anak memperagakan kisah G30S. Semua mau jadi PKI. Sebab, bisa menendang, memukul yang berperan jadi jenderal. Yang ditunjuk jadi jenderal lari. Kami kejar terus. Mereka sembunyi di WC dan tak berani keluar. Ha-ha-ha."

Tahun 1995, Kota Pematang digemparkan oleh isu bangkitnya komunisme. Awalnya, pejabat setempat cemas menyaksikan larisnya balon mainan anak-anak berbentuk palu. Setelah diselidiki, petugas intelijen menyimpulkan: apabila dipukulkan ke sebuah benda keras, balon mainan ini berbunyi seperti boneka. Menurut telinga aparat keamanan bunyinya "arit, arit, arit"! Jadilah palu-arit! Ini pasti PKI.

Semakin gencar diperangi, "PKI-PKI-an" Orde Baru semakin marak di mana-mana. Belakangan ada yang punya ritual setiap akhir September: bikin sendiri bendera PKI untuk dibakar sendiri. Ada yang menuduh Presiden Joko Widodo itu keturunan PKI. Sayang, beliau tidak menjawab: "Kalau ya, emangnya kenapa?"

Marxisme tak perlu dikeramatkan. Zaman emas Marxisme sudah lewat sebagai ilham gerakan politik. Dalam forum akademik, ia tidak lagi sepopuler dulu. Namun, sebagai salah satu teori klasik, pokok-pokok wawasannya wajib dikenal siapa pun yang menekuni ilmu sosial-budaya.

Penduduk RI lebih dari 276 juta. Berapa persen yang bisa terpikat Marxisme seandainya bebas mempelajarinya? Berapa persen yang menganut paham-paham lain yang diancam KUHP? Berapa persen yang hidup bersama di luar nikah atau bercinta dengan sesama jenis kelamin?

Negara sebesar RI merasa terancam sebuah paham atau kegiatan seks segelintir minoritas? Kok bisa?

Marxisme

(Sambungan dari halaman 1)

Marxisme mengglobal, termasuk di kalangan mereka yang taat beragama.

Demam Marxisme di paruh pertama abad ke-20 selazim demam modernisasi, demokratisasi, atau rambut gondrong bagi pria di paruh kedua abad itu. Selazim kepedulian kaum muda masa kini pada lingkungan hidup dan perubahan iklim. Memidana penggemar Marxisme seaneh memidana jutaan penganut demokrasi atau gerakan lingkungan. Lebih aneh jika itu terjadi ketika Marxisme sudah kalah populer ketimbang K-pop di kalangan kaum muda.

Jangan-jangan yang anti-Marxisme tidak pernah belajar tentang Marxisme. Mau belajar di mana? Kan, dilarang. Jangan-jangan meluasnya anggapan Marxisme bertentangan dengan Pancasila akibat kurangnya pengajaran sejarah lahirnya Pancasila serta kuatnya warisan cuci otak Orde Baru.

Bagaimana kelak KUHP diterapkan? Bagaimana tuduhan penyebaran paham terlarang akan disambut masyarakat yang tidak diberi kesempatan belajar secara bebas dan kritis paham-paham itu? Kita lihat saja nanti, tetapi sejarah sudah memberi banyak pelajaran penting.